

STUDI IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KKNI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS DI LPTK SE-KOTA BENGKULU

Ali Akbar Jono

*Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu*

Abstrak

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah salah satu rujukan nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumberdaya manusia melalui pencapaian kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek dan kesiapan beberapa perguruan tinggi di kota Bengkulu yang berposisi sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) program studi pendidikan bahasa Inggris terhadap wacana pemberlakuan kurikulum berbasis KKNI yang efektif akan diberlakukan pada tahun akademik 2016/2017. Disamping itu penelitian ini bertujuan menjadi sarana penemuan solusi terhadap kendala yang menjadi rintangan dari pemberlakuan kurikulum berbasis KKNI. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kelima LPTK yang menyelenggarakan program studi pendidikan bahasa Inggris pada prinsipnya siap melakukan pemberlakuan kurikulum berbasis KKNI pada tahun akademik 2016/2017, akan tetapi efektifitas penerapan kebijakan ini seyogyanya dibarengi dengan kesiapan semua perangkat yang dibutuhkan termasuk kebijakan pengembangan kurikulum tertulis dari masing-masing institusi secara permanen. Dari lima LPTK yang ada, hanya FKIB-Unib yang telah menerapkan kurikulum KKNI dan berjalan baik sedangkan yang lain masih dalam proses finalisasi struktur kurikulum yang diharapkan. KKNI, Pembaharuan Kurikulum, dan LPTK

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Mahasiswa, Keputusan Kuliah

LATAR BELAKANG

Pengembangan kurikulum merupakan kebutuhan utama dalam menyongsong dan menopang laju perkembangan dunia akademik terutama perguruan tinggi antara lain melalui kemampuan pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk mampu beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja sebagai akibat perkembangan zaman dan teknologi, antara lain diindikasikan dengan munculnya peradaban dalam kancah Pasar Bebas (AFTA) dan masyarakat ekonomi Asia (MEA).

Menyikapi fenomena pengembangan dan pembaharuan kurikulum yang sedang bergulir akhir-akhir ini, terutama pada level pendidikan tinggi, dimana ada senyalemen yang mengatakan bahwa setiap program studi pada perguruan tinggi di Indonesia diwajibkan untuk menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dengan mengacu kepada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/ *Indonesia Qualification Framework*) bidang pendidikan tinggi. Instruksi nasional ini termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang

pendidikan tinggi. Permen ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 dijelaskan bahwa KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor¹.

Pendidikan Bahasa Inggris (disingkat PBI), merupakan sebuah program studi di bawah naungan institusi perguruan tinggi setingkat Fakultas/Jurusan yang berperan sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Lembaga ini lebih akrab dengan istilah FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) terutama pada lembaga pendidikan tinggi umum, sementara itu pada pendidikan tinggi agama berada di bawah Fakultas Tarbiyah dan Tadris (FTT), dengan harapan dimana melalui optimalisasi lembaga ini dalam prosesi pembibitan dapat

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, Bab I, Pasal 1.

membidani calon-calon tenaga pendidik dalam bidang studi bahasa Inggris (tadris bahasa Inggris) yang mumpuni, dan berdaya saing.

Menyikapi berbagai fenomena yang tersurat maupun yang tersirat dalam perjalanan di beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Bengkulu terutama perguruan tinggi yang mewadahi LPTK dengan program studi atau jurusan pendidikan bahasa Inggris, yaitu antara lain FKIP UNIB, Fakultas Tarbiyah - Tadris IAIN Bengkulu, FKIP UT, FKIB UMB, dan FKIP Unihaz.

Sementara itu secara yuridis menjabarkan bahwa setiap program studi yang ada pada masing-masing perguruan tinggi wajib menerapkan kurikulum berbasis KKNI, yaitu sebagaimana tertuang dalam pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI kemudian dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Maka dari kondisi lulusan LPTK prodi pendidikan bahasa Inggris sebagaimana yang tergambar di atas dan sejalan dengan fenomena tentang Penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi keharusan dalam rangka mencetak lulusan yang berkompeten dan berdaya saing, melalui penelitian ini penulis tertarik untuk mencari tahu tentang bagaimana penerapan kurikulum berbasis KKNI pada Prodi pendidikan bahasa Inggris dari masing-masing LPTK yang ada di Kota Bengkulu, yaitu FKIP-Universitas Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris – IAIN Bengkulu, FKIP-Universitas Muhammadiyah Bengkulu, FKIP-Universitas Terbuka Bengkulu dan FKIP-Universitas Hazairin Bengkulu.

MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana prospek pengimplementasian kurikulum berbasis KKNI bagi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada LPTK se-Kota Bengkulu?
2. Bagaimana kesiapan penerapan kurikulum berbasis KKNI prodi pendidikan bahasa Inggris pada masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) yang ada di Kota Bengkulu?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam pengimplementasian kurikulum berbasis KKNI Prodi Pendidikan Bahasa Inggris pada masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK)?

PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, studi tentang rekonstruksi pengembangan kurikulum pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK se-kota Bengkulu (2013). Penelitian ini menghasilkan gambaran tentang mekanisme perubahan dan pengembangan kurikulum yang dilakukan selama ini tidak standar berdasarkan analisis kebutuhan (need analisis). Disamping itu, pihak sebagai pelaku dan pengelola pengembangan kurikulum belum memiliki standar pengembangan kurikulum secara tertulis (permanen) dalam melakukan upaya pengembangan kurikulum dalam rangka menjembatani keinginan, kebutuhan serta harapan semua pihak.

Kedua, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi Agroindustri Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kajian ilmiah yang dilakukan oleh Mukhidin dan Mustika Nurmalia Handayani pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia (2014). Hasil penelitian ini berupa strategi pengembangan kurikulum pendidikan teknologi agroindustri berbasis KKNI dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: (1) perumusan profil lulusan melalui analisis SWOT juga tracer study; (2) perumusan learning outcome (capaian pembelajaran) program studi mengacu pada KKNI; (3) perumusan bidang kajian dan kedalaman mata kuliah; (4) penyusunan struktur kurikulum dan silabus kedalam dokumen kurikulum program studi pendidikan teknologi agroindustri.

SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini dipandang penting untuk dilaksanakan, antara lain sebagai media sosialisasi bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pengelolaan pendidikan tinggi terutama LPTK yang menyelenggarakan program studi pendidikan bahasa Inggris, termasuk mahasiswa, masyarakat sebagai pengguna atau stakeholdes tentang kebijakan pemerintah melalui peraturan presiden (perpres) nomor 8 tahun 2012 yang kemudian dituang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 73 tahun 2013 mengenai kewajiban setiap program studi di semua lembaga pendidikan tinggi yang mewadahnya untuk efektif melaksanakan kurikulum berbasis KKNI yang terhitung paling lambat tahun akademik 2016/2017.

Dan melalui penelitian ini pula diharapkan menjadi pembuka tabir dalam mengurai kekusutan dari berbagai hambatan dan tantangan dalam menyiapkan proses penerapan kurikulum berbasis KKNI pada prodi pendidikan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh setiap LPTK yang ada di Kota Bengkulu.

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Umum Kurikulum

1. Makna Kurikulum

Menurut pendapat Kevin, *the term curriculum is broad and refers to the whole learning experience of students. For example, it can include a formal plan, global objectives, and the methods of educational delivery* (Kevin B, 2011). Jadi kurikulum adalah rencana program pengajaran atau pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ibarat orang yang akan membangun rumah, kurikulum adalah 'blue print' atau gambar cetak birunya.

Definisi kerja kurikulum pada lembaga pendidikan pada dasarnya merupakan suatu alat/usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan/sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai, maka harus meninjau tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah tersebut.

2. Peranan Kurikulum

Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan para siswa, sebagaimana yang diulaskan oleh Suryosubroto, yaitu: (a) Peranan konservatif: salah satu tanggung jawab kurikulum adalah menstransmisikan dan mentafsirkan warisan sosial dengan dan generasi muda. Karena adanya peranan ini, maka sesungguhnya kurikulum itu berorientasi pada masa lampau dan peranan ini sanat mendasar tafsirannya; (b) Peranan kritis atau evaluatif: kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Dengan demikian, kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu; (c) Peranan kreatif: mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang dalam masyarakat guna membantu tiap individu dalam mengemab,angkan semua potensi yang apa adanya (Suryosubroto, 2005).

3. Fungsi Kurikulum

Ringkasnya Alexander Inglis dalam bukunya "*Principle of Secondary Education* (Alexander James: 2010),." menyatakan bahwa fungsi kurikulum adalah : (a) Fungsi penyesuaian: individu hidup dalam lingkungan. Setiap individu harus mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya secara menyeluruh; (b) fungsi integrasi: kurikulum berfungsi mendidik pribadi yang terintegrasi; (c) fungsi deferensiasi: kurikulum perlu memberikan layanan terhadap perbedaan perorangan dalam

masyarakat, dan hal ini dapat membuat orang berpikir kritis dan kreatif.dan ini mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat (d) fungsi persiapan: kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh; (e) Fungsi pemilihan: anantara keperbedaan dengan pemilihan adalah dua hal yang erat sekali hubungannya; (f) Fungsi diagnostik: salah satu segi pelayanan pendidikan ialah membantu mengarahkan para siswa agar mereka mampu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya.

4. Pengembangan Kurikulum LPTK dan Kaitannya dengan KKNi

Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan kurikulum; *Pertama*, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akibat kemajuan tersebut banyak hal-hal baru yang ditemukan di dunia ilmu pengetahuan, maka tidak boleh tidak sekolahharus merespon hal tersebut. *Kedua*, perubahan masyarakat (*social change*), banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat ini menuntut pula terhadap perubahan kebutuhan dan orientasi masyarakat, dan ini berpengaruh pula bagi timbulnya perubahan kurikulum karena kurikulum itu sifatnya dinamis berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kemajuan zaman, maka perubahan dan pengembangan kurikulum bukanlah sesuatu yang tabu (Daulay, 2007: 94).

Dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, dalam hal ini Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), juga merupakan sebuah institusi pendidikan dalam konteks pendidikan profesi guru (PPG) dalam rangka melakukan proses kelahiran bibit unggul yang profesional yang mumpuni dan berkompeten sebagai guru yang dapat digugu oleh siswanya. dalam konteks ini pengelola program studi atau jurusan sepatutnya melakukan penetapan konsep pencapaian mutu lulusan sebagaimana yang diinisiasikan dalam grand desain pada visi dan misi intitusi dimana konsep lulusan tersebut selanjutnya akan terwujud dalam bentuk profil lulusan.

Berkaitan dengan konteks ini ada dua kata kunci untuk mengkaitkan antara kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dan kualifikasi². Artinya pengemasan capaian pembelajaran ke dalam jenjang kualifikasi KKNi sangat penting untuk keperluan penyandingan

² Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2013. Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK

maupun penyetaraan kualifikasi dan atau rekognisi antara tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan.

Oleh karenanya untuk menyingkapi fenomena yang mengindikasikan adanya keterkaitan yang signifikan antara pengembangan kurikulum LPTK dengan KKNI diperlukan pedoman secara khusus mengenai langkah strategis dan inovatif yang dapat dipedomani oleh pengelola LPTK dalam mengambil langkah berupa kebijakan pengembangan kurikulum itu sendiri. Karen dengan adanya format yang demikian pengelola dapat merujuk tentang bagaimana merumuskan capaian pembelajaran untuk tingkat program studi yang juga disebut standar kompetensi lulusan serta tingkat perkuliahan sehingga nantinya adanya kekonsistenan dalam pencapaian visi dan misi pengembangan dan layanan pendidikan di LPTK.

Hubungannya dengan KKNI, bahwa di setiap jenjang atau levelnya mengandung tiga capaian yang terintegrasi satu sama lain, yaitu keterampilan (*kognitif dan psikomotorik*) yang dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan program perkuliahan; pengetahuan (*content knowledge*) yang melandasi keterampilan yang dimiliki agar mampu beradaptasi dengan perubahan di masa mendatang; kemampuan manajerial bagi keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai agar dapat berkembang sesuai dengan tuntutan profesionalnya.

B. KONSEP KKNI

1. KKNI dan Landasan Yuridis

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sendiri merupakan kerangka acuan minimal yang menjadi ukuran, pengakuan penjenjangan pendidikan yang dilakukan. KKNI juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Disamping itu KKNI memiliki kedudukan formal yuridis dalam bentuk Peraturan Presiden, sebagai penjabaran dari peraturan-peraturan yuridis formal yang lebih tinggi yang tercakup di dalam UU No. 20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP No. 31 / 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, serta peraturan perundangan lain yang terkait dengan aspek-aspek mutu, sertifikasi, kualifikasi ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga berwenang lainnya.

Dalam perspektif KKNI, setiap program studi diharuskan memperjelas “profil lulusan” yang

diharapkan melalui kegiatan pelacakan studi, studi kelayakan dan analisis kebutuhan di masyarakat. Profil lulusan mencerminkan kemampuan minimal yang harus dikuasai mahasiswa setelah lulus yang merujuk pada empat aspek kebutuhan (1) sikap (*attitude*), (2) bidang kemampuan kerja, (3) pengetahuan, dan (4) manajerial dan tanggung jawab. Keempat kemampuan kemudian harus dijabarkan ke dalam sebuah capaian pembelajaran (*learning outcome*) pada setiap mata kuliah di program studi. Sehingga nantinya, semua perencanaan pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Semester (RPS) harus didasarkan pada capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) yang sesuai dengan kebutuhan profil lulusan.

2. Tujuan KKNI

Kurikulum KNNI dan SNPT bermuara pada profil lulusan. Bagaimana lulusan berkiprah di bidang keahlian tertentu selepas menyelesaikan studi. Harapannya, mereka memiliki kompetensi memadai. Ilmu dari dalam kampus dapat diterapkan dalam dunia kerja (Olivia Fachrunnisa, *Kampus Wajib Terapkan KKNI* .<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id>. diunduh Kamis, 04 Oktober 2015).

Dengan demikian penerapan kurikulum berbasis KKNI pada lembaga pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman untuk; (a) menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja; (b) menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja; (c) menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja; (d) mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia³.

Selain itu implikasi yang diharapkan dari penerapan kurikulum berbasis KKNI ini adalah; (1) meningkatnya kuantitas sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional; (2) Meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja dalam

³Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. 2014. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

pertumbuhan ekonomi nasional; (3) meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia; (4) meningkatnya pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.

3. Mekanisme Pelaksanaan KKNi

Pelaksanaan KKNi melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan *Learning Outcomes (LO)*, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusunan Rencana Perkuliahan.

Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu adanya konsentrasi penuh pada beberapa hal, antara lain; (1) *Learning Outcomes*; (2) Jumlah SKS; (3) Waktu studi minimum; (4) Mata Kuliah Wajib untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum; (5) Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa; (6) Akuntabilitas asesmen; (7) Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip).

KKNi juga diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan diluar ranah Kementerian Pendidikan Nasional, pengalaman kerja atau jenjang karir ditempat kerja. Secara skematik pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNi dapat dilakukan melalui empat tapak jalan (*pathways*) atau kombinasi dari keempatnya. Tapak jalan tersebut, terdiri dari tapak jalan pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir di industri/dunia kerja serta tapak jalan berupa akumulasi pengalaman individual.

Dengan pendekatan tersebut maka KKNi dapat dijadikan rujukan oleh semua pemangku kepentingan yang terkait dan peduli terhadap pengembangan sumberdaya manusia baik di lingkungan kerjanya masing-masing, di masyarakat luas atau setiap individu dalam merencanakan pengembangan karirnya. Selanjutnya, sektor pendidikan formal di tingkat pendidikan tinggi, dapat menggunakan KKNi sebagai rujukan untuk merencanakan sistem

pembelajaran yang akan diselenggarakan sedemikian sehingga kemampuan lulusannya sesuai dengan kualifikasi salah satu jenjang KKNi dan setara dengan jenjang karir di dunia kerja.

KKNi juga dapat dijadikan panduan oleh asosiasi profesi di tingkat nasional untuk menetapkan kriteria penilaian kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang calon anggota sebelumnya atau seorang anggota yang ingin meningkatkan jenjang predikat keanggotaannya. Sektor-sektor lain seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, industri, dan lain-lain juga membutuhkan KKNi sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan dan peningkatan mutu sumberdaya manusianya secara lebih komprehensif dan akurat baik yang berhubungan dengan sistem karir, remunerasi atau pola rekrutmen baru.

KERANGKA TEORI

Pengembangan kurikulum di lingkungan Pendidikan Tinggi (PT), khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus didasarkan pada pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Ini menuntut adanya keterkaitan antara visi dan misi lembaga dengan tujuan dan sasaran program studi yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan perkembangan yang ada dan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Dalam prakteknya, ini menuntut prinsip dan pendekatan yang seksama. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum mencakup prinsip dan prosedur yang berkenaan dengan perencanaan, penyajian (*delivery*), manajemen, dan evaluasi dari segenap proses belajar-mengajar.

Sementara itu, secara umum di belahan dunia lain, KKNi atau yang dikenal luas sebagai *National Qualification Framework (NQF)* adalah isu besar yang menyeret secara bersama-sama elemen dunia pendidikan, ketenagakerjaan, dan dunia kerja.

KKNi terdiri atas sembilan jenjang yang dimulai dari tamatan pendidikan dasar (kualifikasi 1), pendidikan menengah baik SMA maupun SMK (kualifikasi 2), lulusan Diploma 1 sampai Diploma 3 (kualifikasi 3, 4, dan 5), dan lulusan pendidikan profesi (kualifikasi 6) serta S-1/Diploma 4, S-2 dan S-3 (berurutan kualifikasi 7, 8, 9).

Makna dan konsekuensi dari sembilan level kualifikasi tersebut dalam konteks menyandingkan dan menyetarakan adalah sebagai contoh, sesama sarjana teknik (kualifikasi 7), tidak peduli dari kampus perguruan tinggi negeri (PTN) top, PTN kelas bawah, perguruan tinggi swasta (PTS) kelas top ataupun kelas ruko harus bisa disandingkan dan disetarakan kualifikasinya, disamakan gajinya, disamakan beban kerjanya, dan harus mampu

melakukan hal yang sama. Apakah kira-kira pendidikan tinggi di Indonesia sudah siap disandingkan dan disetarakan seperti ini?.

Bila dikaitkan dengan undang-undang guru dan dosen Nomor 14 tahun 2005, tentu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di lingkungan LPTK adalah menghasilkan guru bahasa Inggris yang profesional. Secara lebih spesifik dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 1, ayat 1 ditegaskan bahwa guru 1 (pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah) adalah tenaga kependidikan yang memiliki kreatifitas intelektual dan moralitas yang berkarakter.

Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sarat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seyogyanya kurikulum melakukan upaya perubahan, pengembangan dan inovasi terhadap tuntutan tersebut. Sebuah keniscayaan bila kurikulum terus hadir dengan pola-pola perubahan sebagai hasil dari pemikiran masyarakat, karena “pengguna” kurikulum pada akhirnya juga masyarakat.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berfilial pada metoda deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, meginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisan data tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam Jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berorientasi pada deskripsi secara umum (*descriptive study*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari berbagai sumber informasi yang dibutuhkan.

Penelitian ini berusaha untuk melihat, mengamati, dan mengetahui keadaan sebenarnya serta menggali informasi melalui teknik-teknik pengamatan (*observasi*), wawancara mendalam, wawancara informal dan diskusi kelompok (*focus group discussion*).

Wilayah Penelitian

Yang menjadi wilayah penelitian ini adalah perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Bengkulu yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pendidikan bahasa Inggris, yaitu: FKIB UNIB, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, FKIP UT, FKIP UMB dan FKIP Unihaz.

B. Sumber Data

Peneliti akan banyak berhubungan dengan sumber data (*informan/responden*) dalam rangka mengumpulkan sejumlah informasi yang akan dijadikan bahan kajian untuk ditelaah lebih lanjut serta dengan mengkonfirmasi data tersebut dengan sejumlah teori.

Dan sebagai juru kunci dalam wawancara mendalam, peneliti melakukan penelesuran informasi dan data melalui beberap responden yang dianggap berperan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan juga dapat melakukan triangulasi serta verifikasi data pada pengelola lembaga penjamin mutu dari masing-masing LPTK. Dan begitu juga untuk memperoleh keabsahan data dan realibel informasi, peneliti melakukan studi beberapa dokumen penting yang dijadikan landasan atau acuan pembuatan kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan bahasa Inggris pada masing-masing LPTK yang dimaksud.

C. Teknis Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada dua jenis data, yaitu:

- a. Data primer, dimana data yang peneliti kumpulkan secara langsung dari responden atau informan melalui penerapan metode survei, observasi, wawancara dan kuesioner sehingga melalui metode ini peneliti dapat menjangir informasi mengenai opini, sikap, pilihan, dan persepsi responden tentang penerapan kurikulum berbasis KKNI pada prodi pendidikan bahasa Inggris di masing LPTK yang ada di Kota Bengkulu.
- b. Sedangkan data skunder, merupakan data yang tidak langsung peneliti akses melainkan dengan melalui analisis dan adopsi dari dokumen cetak ataupun elektronik yang memberikan informasi tentang efektivitas penerapan kurikulum berbasis KKNI pada prodi pendidikan bahasa Inggris di masing-masing LPTK.

D. Teknis Analisis Data

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis mendalam dalam rangka mencari

pemaknaan (*meaning*) dari temuan data hasil penelitian, yaitu dengan proses analisis yang digambarkan Spradley berikut:

- a. Proses reduksi data, peneliti melakukan pemilahan, memfokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan dan menjawab pertanyaan penelitian, kemudian menyederhanakan, menyusun secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang dipandang penting sebagai hasil temuan.
- b. Hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk display data, menggunakan uraian (teks naratif).
- c. Membuat verifikasi data untuk memperoleh kesimpulan. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data-data yang dihimpun dengan melakukan pengamatan, wawancara dengan teknik triangulasi data (check-recheck, cross check, konsultasi dengan pakar).

TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi dan sistem penyelenggaraan program studi pendidikan bahasa Inggris pada masing-masing lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Berdasarkan hasil perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi pada lima perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi bahasa Inggris, yaitu: (a) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu (UNIB); (b) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB); (c) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka Bengkulu (UT); Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu; dan FKIP Universitas Hazairin, ditemukan bahwa kondisi dan sistem penyelenggaraan program studi pendidikan bahasa Inggris pada masing-masing lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) tersebut berlangsung baik, dinamis dan aktif. Akan tetapi masing-masing LPTK memiliki memiliki karakter dan cirikhas tersendiri yang menunjukkan keberagaman mekanisme pola pengelolaannya karena dilandasi oleh kedudukan lembaga dari payung hukum atau anggaran dasar rumah tangga (ADRT) yang berbeda.

Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa dari kelima institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tenaga kependidikan program studi bahasa Inggris yang ada di Kota Bengkulu sebagai Ibu kota Propinsi empat LPTK sudah terakreditasi dengan predikat Baik (B).

Sedangkan LPTK-FKIP Unihaz sedang dalam proses pengisian Borang Akreditasi karena usia kelahiran prodi yang masih muda sekali, yaitu pada tahun 2014. Keempat LPTK yang telah meraih predikat B dengan latar belakang organisasi kelembagaan yang berbeda, dimana dari keempat LPTK tersebut 3 (tiga) LPTK dari katagori perguruan tinggi dengan status negeri, yaitu; FKIP UNIB, FKIP UPBBJJ-UT, dan Fakultas Tarbiyah & Tadris IAIN Bengkulu. Dan katagori perguruan tinggi milik yayasan dengan status swasta yaitu; FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan FKIP Universitas Hazairin.

2. Kesiapan Penerapan kurikulum Berbasis KKNI ditinjau dari aspek materi, tenaga, infrastruktur, dll.

Sebagaimana elaborasi dan deskripsi panjang lebar tentang konsep dan paradigma kurikulum secara teoritis di atas bahwa keberadaan kurikulum dalam suatu pengajaran dan pembelajaran pada sebuah lembaga pendidikan berperan sangat signifikan dan memiliki andil utama sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem akademik yang dijadikan landasan pencapaian hasil belajar yang diharapkan. Dan untuk menopang jalannya pemberlakuan serta penerapan kurikulum yang defenitif pada sebuah lembaga pendidikan itu dibutuhkan juga infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal dan berdaya guna dalam rangka mewujudkan capaian hasil yang diharapkan berkualitas atau berkompetensi di bidangnya dengan memiliki nilai jual yang tinggi.

Upaya pembaharuan kurikulum merupakan tugas rutin setiap institusi pendidikan, dalam hal ini khususnya Fakultas kependidikan/Tarbiyah sebagai wadah LPTK dengan prodi/Jurusan pendidikan bahasa Inggris, proses ini juga dilakukan secara regular, berkala, dan konsisten. Oleh sebab itu institusi harus mempunyai tim yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum.

Program studi bahasa Inggris yang dijadikan objek pengajaran pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan dari setiap fakultas yang memiliki kewenang penyelenggaraannya tersendiri, yaitu dari ke-lima perguruan tinggi yang ada di kota Bengkulu (FKIP UNIB, FKIP UMB, UPBBJJ-UT, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, dan FKIP-Unihaz).

Menurut pandangan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI dalam salah satu artikel, bahwa pada dasarnya kurikulum merupakan perencanaan pembelajaran yang dirancang berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi-misi lembaga pendidikan. Proses perancangannya diawali dengan menentukan kompetensi lulusan (standar kompetensi

lulusan). Hasilnya, kurikulum jenjang satuan pendidikan. Dalam teori manajemen, sebagai sistem perencanaan pembelajaran yang baik, kurikulum harus mencakup empat hal. *Pertama*, hasil akhir pendidikan yang harus dicapai peserta didik (keluaran), dan dirumuskan sebagai kompetensi lulusan. *Kedua*, kandungan materi yang harus diajarkan kepada, dan dipelajari oleh peserta didik (masukan/standar isi), dalam usaha membentuk kompetensi lulusan yang diinginkan. *Ketiga*, pelaksanaan pembelajaran (proses, termasuk metodologi pembelajaran sebagai bagian dari standar proses), supaya ketiga kompetensi yang diinginkan terbentuk pada diri peserta didik. *Keempat*, penilaian kesesuaian proses dan ketercapaian tujuan pembelajaran sedini mungkin untuk memastikan bahwa masukan, proses, dan keluaran tersebut sesuai dengan rencana

Penerapan kurikulum berbasis KKNi menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh meminta lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai pencetak calon guru harus menyesuaikan pola pembelajarannya seiring kurikulum baru. "Ya harus, LPTK harus melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan desain kurikulum baru (KKNi).

3. Kendala dan Rintangan dalam Penerapan Kurikulum Berbasis KKNi

Kurikulum pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang diasumsikan oleh R. Ibrahim dalam karya editor tim pengembang MKDP Universitas Pendidikan Indonesia, memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan dan bahkan sistem masyarakat. Artinya suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja tentang bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakannya. Dengan demikian hasil yang diharapkan dari suatu sistem kematangan penerapan dan ketercapaian hasil yang optimal melalui pemeliharaan kurikulum agar tetap dinamis.

Secara regulasi eksistensi kurikulum memiliki payung hukum yang sangat kuat membetengi proses perjalanan pendidikan itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; kemudian untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan

tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Menyikapi konteks ini, salah satu analisa yang penting untuk dimaklumi sebagaimana ungkapan Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nasional Yogyakarta, bahwa jika mutu pada pendidikan tinggi ingin ditingkatkan maka yang terlebih dahulu dibenahi adalah kurikulumnya karena kurikulum merupakan substansi dasar dalam proses belajar-mengajar (the very substance of schooling and the raise d'etre for the teacher in school. by Murray Print).

Secara eksplisit dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima LPTK yang ada di Kota Bengkulu belum memiliki panduan tertulis bersifat mandiri tentang mekanisme dan prosedur yang berisikan kebijakan pengembangan kurikulum. Akan tetapi secara operasional kelima LPTK ini hanya mengadopsi kebijakan yang digariskan oleh sistem yang diatur dalam regulasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) di bawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan LPTK di bawah payung Kementerian Agama tetap mengadopsi dari Dikti namun secara teknis pejabaran kebijakan ditafsirkan pelaksanaannya melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS).

Selain itu kendala teknis lainnya adalah ketersediaan infrastruktur, sumberdaya manusia dan media/sumber belajar dari masing-masing LPTK masih belum memadai. Hal penting untuk selalu diprioritaskan secara intensif, antara lain dengan pemetaan mutu, analisis kebutuhan mutu serta perbaikan mutu untuk menyusun standar pendidikan.

B. Pembahasan

Secara operasional melalui penerapan kurikulum berbasis KKNi dalam proses kegiatan akademik pada prodi pendidikan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh LPTK yang ada, paling tidak diharapkan terwujudnya sasaran sebagaimana yang diharapkan berikut:

a. Kurikulum Berbasis Learning Outcomes (KBO) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis KKNi

Kehadiran KKNi merupakan acuan umum bagaimana kualifikasi seseorang mendapat pengakuan di dunia kerja. Mendikbud menjelaskan: kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNi sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional semakin terbuka. Pergerakan

tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif.

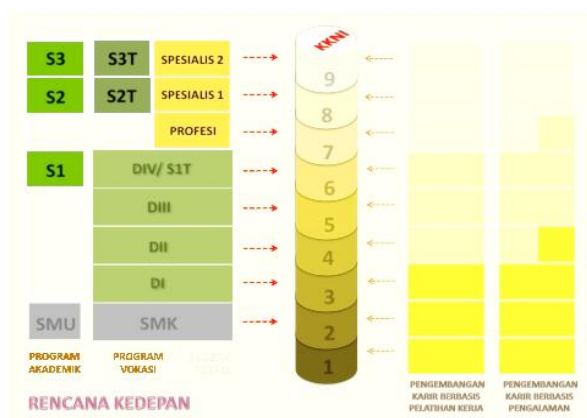
Agar dalam jangka pendek dan jangka panjang Indonesia mampu bertahan tetapi tetap bergerak maju di arena ekonomi global, maka pengakuan timbal balik dan setara dengan negara asing menjadi butir-butir yang kritis dalam pengembangan suatu kerangka kualifikasi tenaga kerja nasional.

Ada tiga strategi pengembangan KKNI; *Pertama*, KKNI menganut strategi kesetaraan kualifikasi seseorang yang diperoleh dari dunia pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman bekerja; *Kedua*, KKNI mengakui kualifikasi pemegang ijazah yang akan bekerja maupun melanjutkan pendidikan di luar negeri, pertukaran pakar dan mahasiswa lintas negara atau pemegang ijazah dari luar negeri yang bekerja di Indonesia; *Ketiga*, KKNI mengakui kesetaraan kualifikasi capaian pembelajaran berbagai bidang keilmuan pada tingkat pendidikan tinggi, baik yang berada pada jalur pendidikan akademik, vokasi, profesi, serta melalui pengembangan karir yang terjadi di strata kerja, industri atau asosiasi profesi.

Sementara itu, KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi. Deskripsi jenjang kualifikasi KKNI menurut Perpres No. 8 Tahun 2012 diuraikan dalam bagan berikut ; 1) Jenjang 1 sampai 3 dikelompokkan dalam jabatan operator diduduki lulusan SD, SMP dan SMA; 2) Jenjang 4 sampai 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis, diduduki oleh lulusan D1, D2, D3, D4 dan Sarjana.3) Jenjang 7 dikelompokkan dalam jabatan ahli, diduduki oleh lulusan pendidikan profesi; 4) Jenjang 8 dikelompokkan dalam jabatan ahli diduduki oleh lulusan magister atau spesialis; 5) Jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli diduduki oleh lulusan doktor atau spesialis.

Bagan

Deskripsi KKNi Menurut Perpres No. 8 Tahun 2012



Selanjutnya secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh empat parameter, yaitu: (1) keterampilan kerja, (2) cakupan keilmuan (pengetahuan), (3) metode dan tingkat kemampuan mengaplikasikan keilmuan, dan (4) kemampuan manajerial.

Internalisasi dan akumulasi keempat parameter yang harus dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur atau melalui pengalaman kerja disebut dengan learning outcomes atau capaian pembelajaran.

b. **Capaian pembelajaran/ Learning outcomes**
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Strata Sarjana (S1) sesuai dengan KKNi
Level 6

Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata Sarjana (S1) yang baru lulus wajib menguasai: Teori, konsep, dan prinsip tentang karakteristik dan perkembangan peserta didik, serta pembimbingan dan pengembangan potensi peserta didik; menguasai teori, pendekatan.

Konsep dan prinsip pengembangan program pembelajaran, penyajian/ delivery, pengelolaan, dan evaluasi program pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik; menguasai berbagai teori, konsep, dan prinsip kebahasaan, kesastraan/literasi, dan belajar bahasa serta menerapkannya dalam pembelajaran bahasa Inggris baik untuk tujuan umum maupun khusus; menguasai kemahiran berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat *pre-advanced* dengan kemampuan:

- 1) memecahkan masalah belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam lingkup sederhana dengan menerapkan teori, pendekatan, konsep, atau prinsip yang berkaitan dengan desain dan model pembelajaran bahasa, kebahasaan, kesastraan, belajar, dan pembelajaran bahasa sebagai alat identifikasi dan analisis;
- 2) menghasilkan simpulan terhadap masalah belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dengan tepat berdasarkan hasil identifikasi dan analisis;
- 3) menyajikan beberapa pilihan pemecahan masalah di bidang belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai asing berdasarkan identifikasi dan analisis sederhana;
- 4) merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing baik untuk tujuan umum maupun khusus berdasarkan identifikasi dan analisis

karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan;

- 5) mendesiminasikan hasil kajian terhadap masalah belajar dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam bentuk laporan ilmiah atau kertas kerja; dan
- 6) bertanggungjawab pada pekerjaan sebagai guru muda secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja lembaga/insititusi dengan dilandasi oleh sikap , perilaku yang diwarnai oleh nilai-nilai kearifan lokal dan ahlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya;
- 7) Ada 5 ketrampilan yang harus dipenuhi oleh seorang lulusan perguruan tinggi agar dapat bersaing, yaitu kemampuan berkomunikasi secara verbal, kolaborasi, profesional di bidangnya, mampu menulis dengan baik, serta kemampuan untuk memecahkan masalah.
- 8) Ada beberapa hal yang digaribawahi olehnya tentang bagaimana model pembelajaran yang sesuai dengan ciri abad ke-21, yaitu pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, dan bukan diberitahu, pembelajaran yang diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menjawab masalah, pembelajaran yang diarahkan untuk melatih berfikir analitis dan bukan berfikir mekanistik, serta pembelajaran yang menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

KESIMPULAN

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

Kondisi dan sistem penyelenggaraan program studi pendidikan bahasa Inggris pada masing-masing LPTK, yaitu; FKIP-Unib, FTT-IAIN Bengkulu, FKIP-UPBJUT Bengkulu, FKIP-UMB, dan FKIP Unihaz, berlangsung baik, dinamis dan aktif meskipun berbeda satu sama lain karena masing-masingnya memiliki karakter dan cirrikhas tersendiri yang menunjukkan keberagaman mekanisme pola pengelolaannya karena dilandasi oleh kedudukan lembaga dari payung hukum atau anggaran dasar rumah tangga (ADRT) yang berbeda.

Dengan kondisi dan persiapan yang dilakukan oleh masing-masing LPTK program studi pendidikan bahasa Inggris yang ada di kota Bengkulu menunjukkan bahwa dari lima LPTK hanya FKIP Universitas Bengkulu yang memiliki kesiapan dalam menyelenggaraan pendidikan dengan penerapan kurikulum berbasis KKNI. Sementara keempat LPTK lainnya, yaitu; FKIP UPBJJ-UT Bengkulu, FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu belum siap menerapkan kurikulum berbasis KKNI karena terkendali pada beberapa hal teknis internal kelembagaan.

Sementara itu yang kendala dalam pengimplementasian kurikulum berbasis KKNI Prodi Pendidikan Bahasa Inggris pada masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK), secara gamblang dapat dikatakan bahwa kelima LPTK yang ada di Kota Bengkulu secara eksplisit belum memiliki panduan tertulis bersifat mandiri tentang mekanisme dan prosedur yang berisikan kebijakan pengembangan kurikulum. Akan tetapi secara operasional kelima LPTK ini hanya mengadopsi kebijakan yang digariskan oleh sistem yang diatur dalam regulasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) di bawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan LPTK di bawah payung Kementerian Agama tetap mengadopsi dari Dikti namun secara teknis pejabaran kebijakan ditafsirkan pelaksanaannya melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS).

Saran

1. Menoptimalisasikan sistem penyelenggaraan program studi pendidikan bahasa Inggris pada masing-masing lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan tetap menjaga mutu akademik berdasarkan kaidah dan kebijakan yang diatur dalam sistem regulasi pendidikan nasional, yaitu antara lain ; UU RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, UU RI no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, perpres no.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Memperkuat kompetensi penunjang akademik berupa penyediaan sarana dan prasarana belajar yang lengkap, dinamis dan up to date sesuai dengan kebutuhan akademik dalam rangka menopang pencapaian hasil pembelajaran yang optimal sebagaimana yang dicetus dalam visi-misi LPTK. Selain infrastruktur yang lengkap juga sangat perlu diperhatikan sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengajar maupun pengelola LPTK yang mumpuni dan memiliki

integritas dan kompetensi keilmuan (profesionalitas).

3. Kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan pengembangan kurikulum LPTK yang menyelenggarakan program studi bahasa Inggris, mulai dari rektor dan jajarannya hingga pada level pengelola prodi atau jurusan diharap tetap solit dan konsisten bersinerji melakukan pemenuhan kebutuhan akademik yang memadai, baik media, sarana dan infrastruktur, dan juga terobosan pengembangan kurikulum berdasarkan nilai-nilai normatif dan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja. Artinya dalam mengambil kebijakan pengembangan kurikulum turut melibatkan stakeholder, asosiasi pengguna atau penyedia lapangan kerja, alumni, dan masyarakat pemerhati pendidikan profesi guru pada umumnya, dan guru bahasa Inggris pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarjono, Ali, Dkk, *Restrukturisasi Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Studi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pada Perguruan Tinggi di Kota Bengkulu)*, LPPM IAIN Bengkulu, 2013.
- Asep, Herry Hernawan, Dkk. *Kurikulum dan pembelajaran*. Tim Pengembang MKDP. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK*, 2013.
- Fachrunnisa, Olivia, *Kampus Wajib Terapkan KKN*. <http://pendis.kemendikbud.go.id/index.php?a=d&etilberita&id.> diunduh Kamis, 04 Oktober 2015.
- Indonesian Qualification Framework, *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional. Edisi.1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Nasional RI*, 2010.
- Inglis, Alexander James, *Principle of Secondary Education. Assistant Professor Of Education*, Harvard University Houghton Mifflin Company Boston New York Chicago didownload dari ks at: <http://scholarcommons.usf.edu/etd>, 2010.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka. Katalog 2015 UTKunaefi, Tresna Dermawan, *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi. Sebuah alternatif Penyusunan kurikulum*, Dikti: Jakarta, 2008.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Acuan Pengembangan Kurikulum*, 2010.
- Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012
- Novianto, Dodi, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah STAIN/IAIN/UIN (LPTK Disampaikan dalam Seminar Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam – Program Magister Manajemen Pendidikan Islam – UIN MALIKI Malang tanggal 1 Desember 2010*. didownload dari: <http://dedinoviyanto.wordpress.com/my-papers/>
- Nuh, Mohammad, Kurikulum 2013 Sudah Dimuat di Harian Kompas, *Artikel* Kamis, 7 Maret 2013 dan didownload dari: <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-mendikbud-kurikulum2013>
- Nuh, Mohammad, *Pola Pembelajaran LPTK sesuaikan kurikulum baru. Disampaikan pada acara Sosialisasi Kurikulum 2013 di Universitas Negeri Semarang (Unnes)*, dalam: <http://id.berita.yahoo.com/mendikbud-pola-pembelajaran-lptk-sesuaikan-kurikulum-baru-155712066.html>
- Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP)
- Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Pratt, David, *Curriculum Design and Development*, New York: Harcourt, 1980.
- Suryosubroto, B, *Tatalaksana Kurikulum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKN*, edisi pracetak (UIN SUKA Jogjakarta, 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005. tentang Guru dan Dosen..
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Panduan Akademik. UMB 2014
- Universitas Terbuka Indonesia. Katalog UT 2013.

Webometric adalah suatu sistem yang memberikan penilaian terhadap seluruh universitas terbaik di dunia melalui website universitas tersebut. Didownload dan dapat diakses melalui <http://www.webometrics.info>

Yamin, Moh, *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan: Panduan Lengkap tata kelola kurikulum efektif*, Yogyakarta: Diva Press, 2012.